



Jurnal Studi Sosial Keagamaan

**Syekh Nurjati**

## **The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia**

### **Pentingnya Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi di Indonesia**

**Jefik Zulfikar Hafizd**  
IAIN Syekh Nurjati, Indonesia

---

#### **Article Information:**

Received : 30.03.2022  
Revised : 26.04.2022  
Accepted : 19.05.2022

#### **Keywords:**

*Education, Sharia Economics, Religious Moderation, Economic Justice*

#### **\*Correspondence Address:**

jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

**Abstract:** *Indonesia is a country with a great Islamic economic potential. National development goals are oriented toward the creation of a just and prosperous society. These goals can be achieved by an economic system based on sharia principles. Although it has great potential, the Indonesian people do not yet have sufficient literacy about Islamic economics. Religious moderation is needed in the community education process so that the resulting literacy has a positive impact. The concept and practice of Islamic economics still require development and are not free from shortcomings that make it not fully in accordance with Islamic law. People with good literacy will behave in a moderate manner, namely accepting the imperfect sharia economic system while still trying to push towards a better direction of conformity with Islamic law and existence in the economy.*

**Abstrak:** Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi syariah yang besar. Tujuan pembangunan nasional berorientasi pada terciptanya masyarakat adil dan makmur. Tujuan ini dapat dicapai oleh sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Meski memiliki potensi besar, namun masyarakat Indonesia belum memiliki literasi yang cukup tentang ekonomi syariah. Moderasi beragama diperlukan dalam proses edukasi masyarakat agar literasi yang dihasilkan memberikan dampak positif. Konsep dan praktek ekonomi syariah masih memerlukan pengembangan dan tidak luput dari kekurangan yang menjadikannya tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat dengan literasi ekonomi syariah baik akan bersikap secara moderat yakni menerima berbagai kekurangannya dengan tetap berusaha untuk mendorong ke arah yang lebih baik dari kesesuaiannya dengan syariat Islam dan sisi eksistensinya dalam perekonomian.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan jumlah bahkan terbanyak di dunia. Indonesia menjadi rumah bagi 231 juta muslim atau sekitar 67,7% dari seluruh populasi warga negara. Jumlah tersebut bahkan hampir 13% dari seluruh populasi muslim di dunia yang mencapai dua miliar.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim menjadikan ekonomi syariah termasuk industri keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar.<sup>2</sup> Namun besarnya populasi tidak serta-merta menjadikan masyarakat muslim Indonesia memahami dengan baik mengenai ekonomi syariah khususnya produk keuangan syariah.

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 29,7 persen yang tergolong *well literature*. Sedangkan pemahaman masyarakat pada produk keuangan syariah masih sangat tertinggal berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 yang menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11%.<sup>3</sup> Indeks literasi keuangan syariah mengalami peningkatan menjadi 8,93% di tahun 2019 dengan industri perbankan syariah memiliki indeks literasi keuangan syariah tertinggi sebesar 7,92%.<sup>4</sup> Indeks Literasi Keuangan Syariah pada tahun 2019 adalah sebesar 8,93% dan Indeks Literasi Ekonomi Syariah Nasional sebesar 16,3%. Indeks Literasi Keuangan Syariah masyarakat Indonesia terhadap Ekonomi Syariah naik menjadi 20,1% pada tahun 2021.<sup>5</sup> Indeks literasi ekonomi syariah warga negara Indonesia masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah total masyarakat muslim di Indoneisa. Dengan banyaknya muslim sebenarnya Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat keuangan syariah di Asia bahkan dunia.

---

<sup>1</sup> World Population Review, "Muslim Population by Country 2022," *World Population Review*.

<sup>2</sup> Erika Firdiana and Khusnul Fikriyah, "Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 99–109.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "National Literacy and Financial Inclusion Survey 2016," *Survey Report* (2016): 1–26.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia," *Otoritas Jasa Keuangan* (2021): 378.

<sup>5</sup> Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam laporan pada Opening Ceremony Indonesia Sharia Economics Festival (ISEF) 2021 dilansir Antara, Rabu, 27 Oktober 2021.

Indonesia memiliki tujuan pembangunan nasional yang berorientasi pada terciptanya masyarakat adil dan makmur dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Pencapaian masyarakat adil dan makmur memerlukan sebuah sistem ekonomi yang memiliki nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.<sup>6</sup> Adapun sistem ekonomi yang memiliki nilai-nilai yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional adalah ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah atau ekonomi syariah. Prinsip syariah merupakan ajaran Islam yang memiliki pedoman al-Qur'an, Hadis, dan dasar hukum Islam lainnya.

Fakta perubahan ekonomi berbasis industri menjadi berbasis sumber daya manusia (SDM) berpengaruh pada cara pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Informasi menjadi unsur yang sangat penting dalam pembuatan keputusan. Untuk menciptakan keputusan yang cerdas maka diperlukan SDM yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan literasi ekonomi yang baik. Setiap orang bisa memutuskan sendiri bagaimana cara yang ia tempuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keputusan yang baik tentu adalah yang dilakukan secara tepat sehingga perlu pemahaman literasi yang baik. Literasi ekonomi yang kurang dapat mengakibatkan kesalahan seseorang dalam pengambilan keputusan misalnya ketika membuat keputusan untuk konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Ekonomi penting untuk dipelajari untuk memahami masalah yang dihadapi manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kajian ekonomi bisa menguraikan cara yang memiliki risiko terkendali sehingga bahaya yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan dapat dihilangkan atau diminimalkan.

Kesejahteraan perlu tersalurkan secara adil kepada seluruh warga negara Indonesia. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara yang baik perlu diupayakan untuk memberikan jaminan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Usaha menciptakan kesejahteraan yang adil

---

<sup>6</sup> UU Nomor 21 tahun 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Indonesia, 2008).

<sup>7</sup> Peter Garlans Sina, "Analisis Literasi Ekonomi," *Jurnal ekonomia* 8, no. 2 (2012): 135–143.

<sup>8</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 138.

tidak hanya menjadi kewajiban negara tetapi peran masyarakat juga sangat diperlukan. Idealnya masyarakat memiliki pemahaman yang baik serta cara berpikir dan cara bersikap yang sejalan pencapaian tujuan.

Upaya peningkatan literasi ekonomi syariah memerlukan model edukasi yang tepat yang sesuai dengan perilaku dan karakter masyarakat Indonesia mulai dari cara beragama hingga cara menjalankan kegiatan perekonomian.<sup>9</sup> Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana pentingnya edukasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah dengan pendekatan moderasi beragama. Tujuan edukasi ini adalah untuk menciptakan indeks literasi yang *well literate* sehingga ekonomi syariah di Indonesia bisa memberikan dampak yang signifikan dalam bidang ekonomi bagi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji tentang Pentingnya Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama Kepada Masyarakat Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi di Indonesia. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini meliputi konsep Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Literasi Ekonomi Syariah, Konsep Moderasi Beragama, dan pentingnya Edukasi Ekonomi Syariah berbasis Moderasi Beragama bagi terwujudnya keadilan ekonomi di Indonesia. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai referensi yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang terkait. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, mengolah bahan penelitian melalui analisis mendalam, dan menyajikannya menjadi tulisan yang layak untuk dibaca.

---

<sup>9</sup> Asyari, "Mengungkit Literasi Ekonomi Syariah," *IAIN Bukittinggi*.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Ekonomi dan Ekonomi Syariah

Ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan ilmu dan seni untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun keinginan manusia. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk mendapatkan suatu hal yang dengan hal tersebut manusia bisa memenuhi kebutuhan atau keinginannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya mendapatkan sesuatu maka perlu cara dan strategi yang tepat, maka seni ilmu dan seni tentang ekonomi diperlukan.

Ekonomi sebagai ilmu mempelajari bagaimana manusia sebagai individu maupun masyarakat berusaha memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan sesuai standar yang diinginkan. Munculnya ilmu ekonomi dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan sumber daya dan keinginan yang tidak terbatas atau biasa disebut sebagai fenomena kelangkaan (*scarcity*). Dengan adanya kesadaran atas kelangkaan tersebut manusia terdorong untuk mencapai tujuan yakni kesejahteraan.<sup>10</sup>

Kebutuhan dan keinginan mempengaruhi adanya kegiatan ekonomi. Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi agar tidak mengganggu manusia baik secara fisik dan psikis. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang diperlukan manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengganggu manusia secara fisik namun bisa mengganggu psikis.<sup>11</sup> Kebutuhan dan keinginan manusia dapat berwujud benda maupun jasa. Suatu kebutuhan yang telah terpenuhi biasanya akan diikuti dengan munculnya kebutuhan lain dan keinginan baru. Misalnya ketika seseorang memperoleh rumah maka bisa muncul keinginan untuk membeli isi rumah, kemudian ingin memiliki mobil, dan seterusnya.<sup>12</sup> Kebutuhan berupa jasa misalnya pendidikan, keamanan, layanan kesehatan, dan jasa lainnya.

---

<sup>10</sup> William A McEachern and Sigit Triandaru, *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer* (Jak: Salemba Empat, 2000).

<sup>11</sup> Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 7th ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>12</sup> Zainur Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32–43.

Bahkan di era digital, bisnis jasa begitu berkembang pesat khususnya yang berkaitan dengan teknologi misalnya jasa analisis data, jasa menulis, jasa layout media sosial, jasa edit video, dan lainnya. Kebutuhan secara sifat bisa dibedakan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa diabaikan untuk menjaga kelangsungan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan yang dibutuhkan karena keinginan disebut kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier merupakan keinginan akan suatu kemewahan baik benda maupun jasa.<sup>13</sup>

Islam mempunyai nilai ajaran yang mengatur perekonomian yang dilandasi dari sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan As-Sunnah. Nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan hukum yang menjadi kewajiban maupun pedoman manusia disebut sebagai syariah. Sehingga kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam bisa disebut sebagai ekonomi syariah. Ekonomi sendiri dalam Islam masuk dalam ranah bidang muamalah yakni kegiatan antara manusia dengan manusia lainnya. Pada dasarnya semua aktivitas manusia dalam perekonomian adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangan. Ekonomi syariah menerapkan dasar keimanan kepada Allah SWT, etika berupa akhlakul karimah, dan menjunjung kemanusiaan.

Nilai ekonomi syariah dapat diterapkan pada seluruh sektor ekonomi seperti sektor keuangan, pariwisata, farmasi, perhotelan dan lain sebagainya baik pada tingkatan mikro maupun makro.<sup>14</sup> Ekonomi syariah dapat diterapkan pada berbagai proses mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara optimal dan ideal.<sup>15</sup> Semua proses yang dikerjakan dalam memiliki tanggung jawab baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Nilai yang dijunjung tinggi tidak semata-mata hanya berbicara tentang benar dan salah secara hukum namun juga baik dan tidaknya secara etika atau akhlak.

---

<sup>13</sup> Hafizd, "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19."

<sup>14</sup> Binti Mutafarida and Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini," *Jurnal of Economy and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 1–13.

<sup>15</sup> Abdul Ghofur, "Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah" (2020).

Ekonomi syariah sebagai sebuah pemikiran ekonomi bisa menjadi alternatif pemikiran ekonomi barat yang telah lama ada. Pemikiran ekonomi berbasis syariah berkembang cukup pesat di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir. Bahkan pemikiran ini tidak hanya berkembang di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam saja, kehadiran pusat keuangan syariah justru ada di negara Inggris. Adanya teknologi digital turut serta membantu penyebaran pemikiran ekonomi syariah.<sup>16</sup>

Ekonomi syariah sebagai ilmu adalah upaya untuk mengkaji berbagai fenomena dan masalah ekonomi yang berhubungan dengan perilaku manusia serta interaksi antar manusia dengan mendalami kajian pada teoritis yang diselaraskan dengan nilai ajaran Islam. Tujuan penerapan ekonomi syariah adalah untuk kemaslahatan manusia. Ekonomi syariah menawarkan konsep aturan perekonomian yang melarang adanya riba yang berakibat pada eksploitasi manusia melalui beban atas pinjaman utang. Keadilan ekonomi perlu menjunjung keadilan karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhannya. Ekonomi syariah menekankan pentingnya kepastian dalam transaksi. Transaksi yang tidak memiliki kejelasan dalam objek, harga, maupun nilai adalah terlarang.<sup>17</sup> Kegiatan ekonomi yang membawa kemaslahatan tidak bisa lepas dari nilai agama. Islam melarang adanya riba, gharar, maysir, kezaliman, dan perilaku tercela lainnya dalam hubungan muamalah karena bisa merugikan pihak lain.

Cakupan pasar ekonomi syariah di Indonesia sangat luas yang mendukung terlaksananya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek ekonomi. Dunia ekonomi dalam tataran global pun memberikan prospek yang baik bagi ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan jumlah muslim dunia, ekspansi ekonomi syariah yang cepat, adanya pengembangan yang pesat dari produk halal, dan etika yang berasal dari nilai ajaran Islam dapat diterima menjadi gaya hidup masyarakat dunia

---

<sup>16</sup> Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).

<sup>17</sup> Mursal Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75–84.

dengan ditandai adanya gerakan halal style. Berbagai produk halal dikembangkan oleh negara-negara anggota Organization of Islamic Cooperation (OIC) atau OKI dalam mengembangkan pasar produk halal, seperti industri pariwisata, pakaian, kosmetik, farmasi dan lain-lain.<sup>18</sup>

Perkembangan ekonomi syariah menghadapi berbagai hambatan. Hambatan yang dimaksud disebabkan oleh kurangnya modal, regulasi yang belum optimal, kurangnya sumber daya manusia yang cakap dalam ekonomi syariah, peranti moneter masih lebih memihak pada acuan bunga, hingga jaringan bisnis yang masih terbatas. Perlu adanya sosialisasi yang baik untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah. Berbagai pelayanan dalam industri halal pun perlu ditingkatkan agar bisa lebih bersaing. Industri halal memerlukan kajian yang serius untuk bisa menemukan standarisasi syariah pada berbagai sektor ekonomi. Selain itu, pengawasan untuk menjamin penerapan prinsip syariah sangat penting agar kepercayaan masyarakat bisa diperoleh. Pemahaman umat Islam menjadi kunci penting dari perkembangan ekonomi syariah.

Sistem ekonomi syariah belum cukup dikenal luas oleh masyarakat. Sistem ekonomi syariah bisa dibilang relatif baru bila dibandingkan dengan sistem konvensional yang telah lama dikenal masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Masyarakat lebih kenal bahkan merasakan kenyamanan pada model bisnis konvensional menyebabkan keengganan untuk mempelajari sistem ekonomi syariah. Skema bagi hasil dalam sistem ekonomi memiliki nisbah atau proporsi margin / bagi hasil namun dianggap tidak memiliki kejelasan berapa beban margin yang harus dibayar dengan pendapatan yang fluktuatif, berbeda dengan sistem bunga yang sudah diketahui jumlahnya pada awal transaksi.<sup>19</sup> Sistem ekonomi syariah lebih rumit dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Jika ingin meminjam uang di bank konvensional maka transaksi yang dilakukan cukup dengan hutang, namun apabila dilakukan di bank syariah maka ada beberapa model akad

---

<sup>18</sup> Mutafarida and Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini."

<sup>19</sup> Ibid.



yang bisa dilakukan misalnya pembiayaan ba'i murabahah (jual beli) dan musyarakah (investasi) serta banyak lagi akad jenis lain.

### **Literasi Ekonomi Syariah**

Literasi memiliki makna pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu.<sup>20</sup> Literasi mempunyai arti keterampilan dalam membaca, menulis dalam proses mencari ilmu atau proses pembelajaran. Literasi merupakan sebuah pembacaan atas ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Literasi mampu mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan.

Literasi ekonomi bisa dimaknai sebagai sebuah perilaku yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang didasarkan atas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan pengetahuan tersebut manusia bisa menunjukkan bahwa yang ada dalam pikirannya merupakan pengetahuan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang atau akan dihadapi. Dimana persoalan yang akan dihadapi oleh semua manusia adalah masalah ekonomi. Sebagaimana bidang ekonomi, maka literasi ekonomi dapat dihubungkan kepada berbagai kategori seperti literasi keuangan atau literasi ekonomi syariah.

Literasi masyarakat Indonesia terhadap ekonomi syariah dinilai masih rendah. Banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami tentang keuangan syariah atau belum mendukung bisnis syariah yang menjadi bagian dari ekonomi syariah. Kecenderungan kelompok yang tidak mendukung bisnis syariah disebabkan oleh beberapa faktor yang beragama seperti lembaga keuangan syariah (LKS) belum banyak dikenal dan digunakan, apabila digunakan maka dapat menyulitkan mereka dalam bertransaksi; terbatasnya informasi yang bisa diterima dari para ahli maupun praktisi ekonomi syariah mengenai dampak negatif adanya bunga; masyarakat belum memahami operasional bisnis syariah secara fundamental dan holistik; dan adanya anggapan bahwa bunga pada

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Literasi," *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*.

lembaga keuangan tidak menyalahi ajaran Islam karena tidak termasuk riba.<sup>21</sup> Sebaliknya ada juga kelompok yang menganggap bank syariah belum benar-benar syar'i sehingga karena tidak 100% syar'i maka haram digunakan. Dari pada menggunakan jasa bank syariah lebih baik hidup sederhana tidak perlu memaksakan meminjam atau membeli yang tidak sesuai kemampuan.

Literasi ekonomi syariah merupakan pengetahuan tentang nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dalam mencari kesejahteraan ekonomi sekaligus mencari ridha Allah SWT. Literasi ekonomi syariah memiliki enam indikator yakni *awerness* terhadap istilah Ekonomi Syariah, *awerness* terhadap produk dan jasa halal, *awerness* Lembaga Keuangan Sosial Syariah, *awerness* pengelolaan keuangan secara syariah, kemampuan numerik, dan sikap pada masa depan. Literasi memiliki beberapa tingkatan yakni *well literate*, *sufficient literate*, *less literate*, dan *not literate*. *Well Literate* adalah kondisi pengetahuan dan pemahaman individu yang mencapai angka 75% pada setiap indikator penyusun Literasi; *sufficient literate* mempunyai pengetahuan sebesar 60% hingga 75%, *less literate* memiliki pengetahuan dan pemahaman sebesar 40% hingga 60%, dan *not literate* merupakan kondisi tidak memahami sama sekali tentang ekonomi syariah.<sup>22</sup>

Perkembangan ekonomi syariah dapat dilihat dari adanya lembaga keuangan syariah dan industri halal. Pertumbuhan perbankan syariah, industri keuangan non bank syariah, dan pasar modal syariah terus berlangsung. Eksistensi lembaga keuangan syariah semakin jelas di Indonesia. Salah satu langkah besar yang dilakukan pemerintah adalah merger tiga bank syariah milik Negara yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Mandiri (BSI). Pertumbuhan industri halal di Indonesia juga mengalami peningkatan seperti dengan munculnya pariwisata halal, hotel halal, makanan halal, hingga sertifikasi produk halal.<sup>23</sup> Ekonomi dan keuangan syariah telah dimulai pada tahun

---

<sup>21</sup> Mutafarida and Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini."

<sup>22</sup> Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Indeks Literasi Ekonomi Syariah" (Jakarta: Bank Indonesia, 2020).

<sup>23</sup> Munasib and Ihsan Sa'dudin, "Makanan Higienis Dan Bergizi Dalam Perspektif Agama Islam," *Jurnal Tawadhu* 3, no. 1 (2019).

1992 sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Selama periode ini, Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Indeks Literasi Ekonomi Syariah Nasional tetap rendah dan menunjukkan angka yang tumbuh sangat lambat.

Performa ekonomi syariah selalu menunjukkan tren positif namun belum cukup baik bila dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki. Kinerja yang baik memerlukan pengetahuan dan *awareness* masyarakat tentang nilai yang ada dalam ekonomi syariah. Masyarakat perlu memahami dengan baik (*well literate*) tentang lembaga keuangan syariah, produk halal, akad syariah, dan hal lain terkait ekonomi syariah. Literasi ekonomi syariah belum memiliki model acuan yang baku.

Dakwah ekonomi syariah banyak dilakukan secara tradisional. Dakwah yang dilaksanakan di masjid/mushalla pada pengajian oleh muballigh/dai hendaknya memiliki fokus materi yang jelas dan aktual. Dakwah ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan menjelaskan ketentuan halal haram, riba, maupun seruan menggunakan mata uang emas. Perlu referensi yang lebih luas dalam dakwah ekonomi syariah mencakup konsep akad syariah, kaidah fikih muamalah, produk lembaga keuangan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dan yang paling penting bagaimana kondisi ekonomi syariah saat ini perlu dipahami dengan baik. Konsep ekonomi syariah masih perlu digali dan memiliki banyak kekurangan, begitu pula implementasinya memerlukan kerja keras dari berbagai pihak. Bisa jadi konsep ataupun implementasi ekonomi syariah belum benar-benar syar'i. Dakwah bila tidak disampaikan dengan materi yang tepat maka bisa membuat pemahaman jamaah justru antipati terhadap gerakan ekonomi syariah mengingat dalam konsep dan implementasinya yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah.

Literasi ekonomi Syariah sangat penting untuk dimiliki masyarakat. Literasi dapat menjadi pertimbangan seseorang dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. Ketidakhahaman akan literasi ekonomi Syariah bisa menyebabkan kesalahpahaman tentang produk ekonomi syariah. Literasi yang terbatas akan mengakibatkan tidak tepatnya pengambilan berbagai keputusan misalnya perencanaan keuangan untuk masa yang

akan datang yang tidak terarah.<sup>24</sup> Sebagai seorang muslim tentu setiap keputusan dalam hidup harus sejalan dengan ajaran agama sehingga literasi tentang ekonomi Syariah yang baik mutlak diperlukan.

### **Konsep Moderasi Beragama**

Moderasi beragama merupakan perwujudan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang cenderung mengambil jalan tengah atau moderat. Penetapan tolak ukur moderasi perlu diambil dari sumber hukum yang tepercaya seperti teks-teks agama, konstitusi, kearifan lokal, dan kesepakatan bersama yang berlaku di masyarakat dan negara. Kunci keseimbangan dalam beragama adalah dengan menolak ekstremisme dan liberalisme.<sup>25</sup> Sikap ekstrem dapat dimaknai sebagai cara bersikap yang berlebihan dalam mengamalkan suatu nilai secara berlebihan tanpa peduli bagaimana sikap orang lain yang berbeda. Sikap liberal dapat dimaknai sebagai cara bersikap yang cenderung mengesampingkan atau bahkan menghilangkan nilai agama, kebenaran hanya diambil dari logika sains manusia atau nilai kemanusiaan saja.

Moderasi beragama memiliki peran yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Untuk mengetahui peran tersebut dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan melihat bagaimana visi besar<sup>26</sup> RPJMN, aspek pengarusutamaan,<sup>27</sup> kaidah pembangunan,<sup>28</sup> dan prioritas nasional.<sup>29</sup> Pada

---

<sup>24</sup> Nurul Izzati Lubis, "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019); Muhammad Lukman Hakim, "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, 1st ed. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>26</sup> "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan"

<sup>27</sup> (1) Kesetaraan gender, (2) tata kelola (governance), (3) pembangunan berkelanjutan, (4) modal sosial budaya, dan (5) pembangunan transformasi digital.

<sup>28</sup> (1) Membangun kemandirian, (2) menjamin keadilan, dan (3) menjaga keberlanjutan.

<sup>29</sup> (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan

RPJMN, moderasi beragama diposisikan untuk mewujudkan salah satu prioritas nasional yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Program nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dibuat berdasarkan enam isu strategis<sup>30</sup> dan empat arah kebijakan Pemerintah.<sup>31</sup> Pemerintah menyelenggarakan program prioritas yakni moderasi beragama dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional untuk membangun karakter warga negara yang berbudi luhur, berjiwa diri, bergotong royong, toleran, dan sejahtera. Moderasi beragama memiliki visi yang sangat relevan dengan RPJMN mengingat adanya tujuan keseimbangan ekonomi yang dibuat tidak lepas dari dimensi ibadah dan sosial.<sup>32</sup>

Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan dan penguatan moderasi beragama. Pelaksanaan dan penguatan moderasi beragama dirumuskan ke dalam lima Kegiatan Prioritas (KP) Teknokratik RPJMN 2020-2024, yakni: (1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah; (2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; (3) Penguatan relasi agama dan budaya; (4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (5) Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Lebih jauh tentang KP 5 Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan; diturunkan menjadi tiga Program Prioritas Nasional (ProPN), yakni: (1) Pemberdayaan dana sosial keagamaan; (2) Pengembangan kelembagaan ekonomi umat;

---

bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

<sup>30</sup> (1) Melemahnya ketahanan budaya dan rendahnya perlindungan hak kebudayaan; (2) Belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan; (3) Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia; (4) Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama; (5) Belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa; dan (6) Masih rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

<sup>31</sup> (1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter; (2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia; (3) Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial; dan (4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

dan (3) Pengelolaan dana haji secara professional, transparan, dan akuntabel.<sup>33</sup>

### **Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama**

Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MESI) periode 2019-2024 dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Program ini dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dengan membangun industri halal di Indonesia. Pembangunan ekonomi syariah yang telah berjalan dianggap belum sesuai target. Kemampuan ekonomi Indonesia ditargetkan untuk mampu meraih potensi maksimal dari pasar global dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dimiliki. Pengembangan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan beberapa strategi, yakni: penguatan halal value, penguatan keuangan syariah, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan pemanfaatan platform *Economy Digital*.<sup>34</sup>

Implementasi MESI memerlukan kesadaran publik yang baik akan pentingnya ekonomi syariah. Publik atau masyarakat merupakan bagian paling penting mengingat banyak peran yang dimiliki masyarakat mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen itu sendiri berasal dari masyarakat. Visi moderasi beragama menjadi sangat relevan untuk mendukung terwujudnya MESI dengan menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara ibadah dengan kehidupan sosial ekonomi. Penguatan moderasi beragama

Moderasi beragama merupakan perwujudan sikap atau perilaku untuk mengajak atau mendakwahkan ajaran agama yang diyakini dengan sikap yang toleran kepada pemeluk ajaran lain. Penghormatan yang diberikan merupakan hubungan sebagai sesama manusia. Moderasi memerlukan komitmen sebagaimana adanya ajaran agama tanpa mengurangi atau

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Dewi Wuryandani, "Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia," *Jurnal Info Singkat* 11, no. 10 (2019): 19–24.

melebihkan.<sup>35</sup> Pemahaman yang baik dan cara pandang yang benar dalam beragama sangat penting dimiliki masing-masing pemeluk agama. Hal terkait ritual keagamaan ibadah masing-masing agama tidak boleh diganggu dan tidak boleh dicampur aduk.<sup>36</sup> Melalui sikap moderat dalam beragama, segala aktivitas masyarakat dalam kegiatan perekonomian atau muamalah dapat berjalan dengan damai.

Potensi ekonomi tidak hanya dinilai dari apa yang ada masa kini namun juga perlu diketahui bagaimana di masa mendatang. Segala upaya perlu dilakukan agar potensi yang mungkin ada bisa diperoleh. Pengembangan ekonomi umat Islam yang masih belum maksimal dapat menjadi pilihan terbaik untuk mencapai target tersebut. Keseriusan dalam mengembangkan ekonomi umat memerlukan sikap yang moderat, inklusif, dan terbuka dari para pelaku ekonomi dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak menumpuk pada kelompok tertentu saja, akan tetapi perlu terdistribusi dengan adil kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>37</sup>

Ekonomi Syariah adalah solusi atas adanya sistem perekonomian yang diskriminatif yang lebih menguntungkan pemilik modal. Belum kuatnya ekonomi syariah bisa dibenahi dengan edukasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Moderasi beragama diperlukan dalam proses edukasi masyarakat agar literasi yang dimiliki memberikan dampak positif bagi ekonomi syariah. Konsep dan praktek ekonomi syariah masih memerlukan pengembangan dan tidak luput dari kekurangan yang menjadikannya tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Apabila sikap masyarakat cenderung radikal maka mereka akan menolak sepenuhnya gagasan ekonomi syariah tersebut, padahal untuk bisa menjadi lebih lebih perlu dukungan banyak pihak bukan malah diabaikan. Apabila sikap masyarakat menunjukkan tidak adanya kepercayaan pada gagasan ekonomi syariah maka mereka akan menganggap rendah gagasan ekonomi syariah

---

<sup>35</sup> Priyantoro Widodo and Karnawati Karnawati, "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia," *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 2 (2019): 9–14.

<sup>36</sup> Eny Latifah and Khurul Aimatul Umah, "Moderasi Beragama: Optimalisasi Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan Dengan Filantropi Islam," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 6, 2022, 98–103.

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*.

dengan justifikasi yang tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Masyarakat yang memiliki literasi ekonomi syariah yang baik (*well literature*) akan bersikap secara moderat yakni menerima gagasan ekonomi syariah dengan berbagai kekurangannya dengan tetap berusaha untuk mendorong ke arah yang lebih baik.

Edukasi ekonomi syariah hendaknya menerapkan model qurani yang lebih mengedepankan distingsi dan menyentuh aspek kognitif dengan mengesampingkan emosional religius. Ekonomi syariah perlu dideskripsikan secara kualitatif, kuantitatif, logis, dan rasional. Begitu pula apa yang dilarang dalam ekonomi syariah seperti riba perlu dideskripsikan dampak negatifnya. Pemahaman yang mendalam bisa menimbulkan kesadaran yang pada akhirnya bisa menjadi perilaku nyata. Model yang hanya cenderung menyampaikan halal-haram secara normatif perlu ditinggalkan. Masyarakat yang telah lama menggunakan sistem riba menghadapi kehadiran ajaran Islam yang membawa ajaran sistem berbasis jual-beli dan bagi-hasil. Konsep jual beli dan bagi-hasil sebagai sistem ekonomi syariah perlu dipahami dengan baik melalui pengenalan sisi positif sistem ekonomi jual beli dan bagi hasil serta sisi negatif praktek ribawi. Sistem jual-beli dan bagi-hasil dalam aktivitas ekonomi memiliki banyak keuntungan sedangkan sistem ribawi dapat menyebabkan kerusakan dalam ekonomi. Keuntungan dari sistem ribawi yang besar hanya berlaku untuk jangka pendek atau hanya menyasar orang tertentu sehingga kehidupan ekonomi menjadi eksploitatif dan sarat ketidakadilan. Maka sudah sewajarnya ajaran Islam mengharamkan sistem ribawi.<sup>38</sup>

Pembangunan literasi ekonomi syariah memerlukan sinergi dan kerja sama yang solid antara berbagai komponen masyarakat. Para pegiat ekonomi syariah yang sudah semestinya ikut berpartisipasi aktif mencakup Akademisi, Asosiasi Ahli Ekonomi Islam, Pemuka Agama, Organisasi Masyarakat Islam, Perguruan Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan IKNB), dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi syariah. Peran Pemerintah melalui OJK bisa menjadi lebih

---

<sup>38</sup> Asyari, "Mengungkit Literasi Ekonomi Syariah."



maksimal apabila bersinergi dengan berbagai asosiasi pakar ekonomi syariah seperti MES<sup>39</sup>, IAEI<sup>40</sup>, dan ASBISINDO<sup>41</sup>. Selain itu peran DSN-MUI dan Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan dalam edukasi ekonomi syariah. OJK bisa membuat program edukasi yang baik dengan kolaborasi bersama asosiasi-asosiasi pegiat dan praktisi keuangan syariah. Peran pegiat ekonomi syariah sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.<sup>42</sup>

Pemuka agama memiliki kedudukan penting dalam dakwah Islam sekaligus penyebaran gagasan ekonomi syariah. Ulama bisa menjadi teladan dan panutan masyarakat. Peran ulama dalam sangat diperlukan untuk edukasi, sosialisasi, dan lobi politik dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. DSN MUI memiliki peran yang paling signifikan dengan kewenangannya menetapkan fatwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemahaman para pemuka agama di luar DSN MUI sangat penting, apabila pemuka agama tidak mengetahui dengan baik tentang bagaimana keuangan syariah bisa berdampak pada kampanye anti gerakan keuangan syariah.<sup>43</sup>

Perguruan Tinggi memiliki peran besar dalam berkembangnya ekonomi syariah. Pembukaan berbagai program studi ekonomi syariah menjadi salah satu bukti besarnya peran PT. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memberikan kontribusi sangat besar. Berbagai temuan dan gagasan tentang ekonomi syariah banyak lahir di perguruan tinggi. Selain itu banyak

---

<sup>39</sup> MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) merupakan organisasi terbesar gerakan ekonomi syariah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun literasi ekonomi syariah di Indonesia. MES aktif memberikan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat melalui berbagai even, seminar, workshop, pelatihan, hingga penerbitan buku.

<sup>40</sup> Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) memiliki peran aktifnya dalam melakukan edukasi dan sosialisasi keuangan syariah sejak tahun 2004 dengan menggelar banyak even edukasi dan sosialisasi seperti simposium, seminar, dan workshop ekonomi syariah.

<sup>41</sup> Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) merupakan asosiasi yang memiliki keanggotaan terbuka untuk seluruh bank syariah, yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

<sup>42</sup> Hani Meilita Purnama and Indri Yuliafitri, "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah," *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019).

<sup>43</sup> Ibid.

pula para ahli dan praktisi ekonomi syariah baru yang muncul berasal dari perguruan tinggi.

Edukasi ekonomi syariah perlu dilakukan kepada berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia melalui berbagai kegiatan. Target sasaran edukasi bisa diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa, majelis ta'lim, organisasi kepemudaan, ibu rumah tangga, para pedagang, dan kelompok lainnya. Gerakan Kampanye Nasional Literasi Keuangan Syariah dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan penyusunan materi edukasi dan membangun media komunikasi.<sup>44</sup>

Masyarakat yang *well literatur* dalam ekonomi syariah bisa memilih dengan keputusan yang tepat dalam ekonomi sejalan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh masyarakat yang *well literatur* bisa menentukan produk keuangan syariah sesuai kebutuhan masing-masing, memahami manfaat dan risiko suatu produk keuangan, mengetahui hak dan kewajiban dalam akad yang dikerjakan, serta meyakini bahwa yang halal justru lebih menguntungkan.

Islam menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah tidak mengenal diskriminasi, semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Dalam ranah muamalah atau ekonomi, manfaat adanya ekonomi syariah termasuk bank syariah bisa dirasakan baik oleh muslim maupun non muslim. Bank syariah boleh memiliki nasabah non muslim baik yang menyimpan dana maupun membutuhkan dana.<sup>45</sup> Non muslim boleh menjadi nasabah bank syariah sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kebebasan dalam melakukan ibadah dan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, kebolehan ini berlaku selama tidak ada pelanggaran pada aturan yang telah disepakati.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Nova Syafrina and SUDARMIN MANIK, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menabung Di PT. Bank Syariah Mandiri," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 1 (2018): 59–70.

<sup>46</sup> Syamsul Hadi Untung and Eko Adhi Sutrisno, "Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2014): 27–48.

## Simpulan

Edukasi Ekonomi Syariah Berbasis Moderasi Beragama Kepada Masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Ekonomi Syariah adalah solusi atas adanya sistem perekonomian yang diskriminatif yang lebih menguntungkan pemilik modal atau sistem yang menjadikan negara mengekang kebebasan masyarakat dalam perekonomian. Keadilan ekonomi di Indonesia bisa terwujud dengan menyebarnya sistem ekonomi syariah yang memiliki sifat moderat bila dibandingkan dengan sistem kapitalis (dominasi pemilik modal) atau sosialis (dominasi negara). Moderasi beragama diperlukan dalam proses edukasi masyarakat agar literasi yang dimiliki memberikan dampak positif bagi ekonomi syariah. Konsep dan praktek ekonomi syariah masih memerlukan pengembangan dan tidak luput dari kekurangan yang menjadikannya tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Apabila sikap masyarakat cenderung radikal maka mereka akan menolak sepenuhnya gagasan ekonomi syariah tersebut, padahal untuk bisa menjadi lebih lebih perlu dukungan banyak pihak bukan malah diabaikan. Apabila sikap masyarakat menunjukkan tidak adanya kepercayaan pada gagasan ekonomi syariah maka mereka akan menganggap rendah gagasan ekonomi syariah dengan justifikasi yang tidak ada bedanya dengan ekonomi konvensional. Masyarakat yang memiliki literasi ekonomi syariah yang baik (*well literature*) akan bersikap secara moderat yakni menerima gagasan ekonomi syariah dengan berbagai kekurangannya dengan tetap berusaha untuk mendorong ke arah yang lebih baik dari kesesuaiannya dengan syariat Islam dan sisi eksistensinya dalam perekonomian.

### Daftar Pustaka

- Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).
- Asyari. "Mengungkit Literasi Ekonomi Syariah." *IAIN Bukittinggi*.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Indeks Literasi Ekonomi Syariah." Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Firdiana, Erika, and Khusnul Fikriyah. "Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 99–109.
- Ghofur, Abdul. "Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah" (2020).
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 138.
- Hakim, Muhammad Lukman. "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Arti Literasi." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*.
- Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 7th ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Latifah, Eny, and Khurul Aimatul Umah. "Moderasi Beragama: Optimalisasi Lembaga Sosial Ekonomi Keagamaan Dengan Filantropy Islam." In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6:98–103, 2022.
- Lubis, Nurul Izzati. "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- McEachern, William A, and Sigit Triandaru. *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Jak: Salemba Empat, 2000.
- Munasib, and Ihsan Sa'dudin. "Makanan Higienis Dan Bergizi Dalam Perspektif Agama Islam." *Jurnal Tawadhu* 3, no. 1 (2019).
- Mursal, Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75–84.
- Mutafarida, Binti, and Choiril Anam. "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini." *Juornal of Economy and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Otoritas Jasa Keuangan. "National Literacy and Financial Inclusion Survey 2016." *Survey Report* (2016): 1–26.
- . "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia." *Otoritas Jasa Keuangan* (2021): 378.
- Purnama, Hani Meilita, and Indri Yuliafitri. "Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah Dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah." *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019).
- Sina, Peter Garlans. "Analisis Literasi Ekonomi." *Jurnal economia* 8, no. 2 (2012): 135–143.

- Syafrina, Nova, and SUDARMIN MANIK. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menabung Di PT. Bank Syariah Mandiri." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3, no. 1 (2018): 59–70.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. 1st ed. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Untung, Syamsul Hadi, and Eko Adhi Sutrisno. "Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2014): 27–48.
- UU Nomor 21 tahun 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Indonesia, 2008.
- Widodo, Priyantoro, and Karnawati Karnawati. "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 2 (2019): 9–14.
- World Population Review. "Muslim Population by Country 2022." *World Population Review*.
- Wuryandani, Dewi. "Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia." *Jurnal Info Singkat* 11, no. 10 (2019): 19–24.
- Zainur, Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32–43.